

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Keberadaan lembaga Badan Penanggulangan Bencana Daerah diamanatkan oleh UU No 24 tahun 2007, Permendagri No 46 Tahun 2008 sebagai penyelenggara urusan pemerintah di bidang penanggulangan bencana mulai dari pra, saat dan pasca Bencana. Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) menunjukkan Akuntabilitas yang dicapai oleh BPDB Bantul sangat baik, capaian kinerja sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2013 dengan skala ordinal pada angka 95 % dapat dikatakan berpredikat sangat berhasil.

Rencana Strategis Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul memberikan gambaran tentang sebuah perencanaan jangka menengah yang sangat dibutuhkan oleh sebuah lembaga. Perencanaan strategis dijadikan acuan bagi kebijakan dan tindakan yang akan dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bantul dalam penanggulangan bencana (sebelum, saat, dan setelah kejadian).

Rencana Strategis Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul disusun dengan berbagai rencana program yang sangat baik, sehingga BPDB Kab. Bantul siap dalam penanganan dan penanggulangan bencana, baik dalam tahap sebelum, saat, dan setelah kejadian bencana.

Data abrasi menunjukkan bahwa pantai di Kabupaten Bantul tergolong dalam kawasan pantai yang harus siaga bencana, khususnya tentang bencana abrasi. Data abrasi pantai di Kabupaten Bantul menunjukkan bahwa abrasi di Pantai Depok sebanyak 16 orang, abrasi di Pantai Kwaru sebanyak 78 orang, dan abrasi di Pantai Samas sebanyak 8 orang. Abrasi di Pantai Kwaru adalah jumlah abrasi terbesar yang terjadi, sedangkan abrasi di Pantai Samas merupakan abrasi yang terjadi dalam jumlah kecil.

Manajemen Komunikasi Bencana yang dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul tergolong baik, mengingat BPBD Kab. Bantul dapat membantu menanggulangi bencana yang terjadi dan meminimalisir korban dalam bencana.

Walaupun pada kenyataannya ada dalam keberhasilan tersebut terdapat faktor pendukung dan penghambat.

Faktor pendukung Manajemen Komunikasi Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bantul adalah koordinasi yang baik dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesadaran masyarakat tentang bahaya bencana, dan anggaran bencana yang datang dari berbagai pihak.

Faktor utama sebagai penghambat Manajemen Komunikasi Bencana BPBD Kabupaten Bantul adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan bahaya abrasi,

disamping terdapat faktor lain seperti bangunan yang menempati lokasi bahaya, koordinasi yang kurang baik, dan bangunan yang tidak kokoh.

## **B. Saran**

1. Perlu adanya sosialisasi tentang bahaya abrasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
2. Perlu anggaran khusus untuk penanganan abrasi.
3. Komunikasi antara BPDB  
dan masyarakat setempat perlu ditingkatkan untuk bersama-sama menangani bencana
4. Kebijakan Pemerintah diperlukan untuk menangani bangunan-bangunan yang tidak legal dan menempati lokasi bahaya di sekitar pantai
5. Penelitian selanjutnya yang akan dilakukan oleh akademis lain diharapkan dapat menyajikan data yang lebih lengkap dalam satu periode
6. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menyempurnakan penelitian ini dengan mengkaji penelitian ini sebagai bahan pertimbangan
7. Penelitian selanjutnya diharapkan melakukan wawancara dengan informan yang lebih banyak dibanding penelitian ini.